

Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis)

**Rohiman Mukti Mubarok, Linda Dwi
Eriyanti, Muhammad Iqbal**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : rohimanmukti@gmail.com

Abstrak

This study analyzes the causes of the failure of the femicide prevention policy in Mexico. Even though the existence of women has been protected by law, they still experience forms of violence and these cases are increasing. So, the author aims to analyze why this policy failed in realizing protection for women. Based on the assumptions of socialist feminist theory and the concept of policy failure regarding the causes of policy failure and oppression against women due to the values and systems that have oppressed women. So, the failure of femicide policies is caused by machismo as part of patriarchy and drug cartel business as a part of capitalism that oppresses women. A culture of machismo has influenced the increasing use of violence. Meanwhile, drug cartel businesses have resulted in an increase in criminal cases against women.

Keywords: *Femicide, Policy failure, Machismo.*

PENDAHULUAN

Femicide menurut definisi Russell dan Caputi (1998) merupakan bentuk terorisme atas pembunuhan perempuan yang didasarkan atas sikap misogini, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan.¹ Kondisi ini semakin diperburuk dengan tidak jelasnya tatanan hukum yang berujung kepada hukum impunitas bagi pelaku kekerasan, ketidakpekaan negara meliputi kelalaian petugas, dan alasan gender karena konstruk sosial sebagai komponen fundamental yang menghasilkan jenis kejahatan yang terjadi secara sistematis dan kejam.

Femicide yang terjadi di Meksiko didasarkan atas penggunaan tindak kekerasan yang seringkali dilakukan oleh pasangan mereka untuk mengakhiri sebuah hubungan. Jenis kekerasan ini lalu dikenal dengan jenis *femicidio intimo*. Berikutnya kasus *femicide* di Meksiko diakibatkan atas meningkatnya kasus kriminalitas terhadap perempuan yang

¹Lihat Janice Joseph, "Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses," *Temida* 20, no. 1 (2017): 4.

dilakukan oleh aktivitas bisnis kelompok kartel narkoba atau dikenal dengan jenis *feminicidio sexual sistémico*.² Masih terdapat tiga jenis lain dalam bentuk *feminicide* yang terjadi di Meksiko, namun dua jenis yang telah dijelaskan merupakan jenis *feminicide* paling umum terjadi di negara tersebut.

Dari dua latar belakang utama mengenai jenis kasus *feminicide* yang sering terjadi, Pemerintah Meksiko telah merespon untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan khususnya tindakan *feminicide* dengan menerbitkan *Undang-Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* pada tanggal 1 Februari 2007 yang mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan landasan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Federal untuk mencegah tindakan *feminicide* dengan berbagai program kampanye gender untuk merubah persepsi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan tindakan yang melecehkan martabat perempuan.

Kebijakan berikutnya adalah menetapkan tindakan *feminicide* sebagai tindakan kriminal yang disahkan pada tanggal 14 Juni 2012 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal Pasal 325. Undang-undang ini mengatur tujuh protokol dalam menetapkan kasus kekerasan *feminicide* dan penetapan sanksi bagi pelaku dengan kurungan penjara selama 40 hingga 60 tahun. Sanksi juga berlaku bagi pegawai negeri atau administrasi peradilan yang telah menunda atau menghalangi sebuah penyelidikan, akan dikenakan hukuman penjara tiga sampai delapan tahun.

Pemerintah tidak hanya menciptakan undang-undang yang berfokus untuk merubah persepsi masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan. Pemerintah Meksiko juga telah berupaya memperkecil ruang gerak atau transaksi bisnis kartel narkoba dengan menciptakan program *La alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM)* pada tahun 2014. Program ini bertujuan meningkatkan patroli kepolisian, memperbaiki infrastruktur untuk menjamin keselamatan perempuan, meningkatkan program pencegahan perlindungan dan investigasi terhadap kekerasan perempuan. Kebijakan ini akan dijalankan apabila suatu Negara bagian dinyatakan darurat atau terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat. Maka Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan deklarasi peringatan gender atau AVGM di wilayah tersebut.

Kebijakan tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Hal ini seperti yang terjadi di Meksiko yaitu dengan berbagai kebijakan yang telah dijalankan, namun kasus *feminicide* semakin memburuk dengan mengalami peningkatan kasus. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil publikasi laporan *Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)* pada tahun 2007- 2017 dan laporan Pemerintah Federal hingga tahun 2019 kasus *feminicide* terus mengalami peningkatan dengan dijelaskan melalui gambar 1 di bawah ini:



² Lihat Patsilí Toledo Vásquez et al., *Feminicidio: Consultoria para la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos* (México: Naciones Unidas : Derechos Humanos : OACNUDH, 2009), 33.

Gambar 1. kasus *Femicide* Meksiko 2007-2019.

(Sumber: Diadaptasi dari OCNF tahun 2007-2018; dan Velazquez, 2020. “*Investigacion Homologada*”).

Maka dengan peningkatan jumlah kasus *femicide* tersebut, kebijakan Pemerintah Meksiko dinilai telah gagal dalam mengurangi dan mencegah kekerasan yang berujung kematian terhadap perempuan. Sehingga hal ini telah melatarbelakangi fokus penelitian penulis dengan mengkaji penyebab kegagalan kebijakan tersebut.

LANDASAN KONSEPTUAL

Untuk mendukung penelitian, penulis menggunakan landasan konseptual dari teori feminisme sosialis dan konsep *policy failure*.

A. Teori Feminis Sosialis

Berdasarkan asumsi dari teori feminisme sosialis ketimpangan gender dan bentuk opresi terhadap perempuan diakibatkan oleh interaksi sistem kapitalisme dan patriarki. Alison Jaggar berasumsi bahwa kapitalisme dan patriarki bersifat eksploitatif dan mengalienasi.

Konsep alienasi dimaknai dengan hilangnya kontrol yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atas diri mereka sendiri maupun hilangnya kepemilikan kontrol atas pekerjaan mereka. Jaggar menjelaskan konsep alienasi mengenai perkawinan dan pekerja seks komersial. Di dalam kapitalisme, seksualitas perempuan menjadi sebuah komoditi. Seorang pekerja seks komersial menjual tubuh dan seksualitasnya kepada orang lain. Hal ini sama dengan makna perkawinan bagaimana perempuan yang bergantung secara finansial kepada laki-laki dengan menjual pelayanan domestik serta pelayanan mengasuh dan merawat untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Maka ini dimaknai sebagai baik istri maupun pelacur, mereka mengalienasi dari pekerjaannya, karena pekerjaan mereka dilakukan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri.

Dalam menjelaskan kasus *femicide* hal ini berkaitan dengan konsep alienasi dalam rubrik seksualitas yang diungkapkan oleh Alison Jaggar yaitu seorang perempuan yang dialenasi atau dipisahkan dari produk yang dikerjakannya termasuk tubuhnya sendiri. Rubrik seksualitas digambarkan dengan hilangnya kontrol dari perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Alienasi dimaknai bagaimana tubuh perempuan yang dipatuhkan. Tubuh sejatinya adalah milik setiap individu, bukan milik kelompok atau publik, karena yang mengatur dan melindungi tubuhnya adalah si pemilik tersebut. Namun tidak demikian, kenyataan yang ada banyak kegelisahan-kegelisahan yang terjadi akan kekuasaan tubuh. Semua tubuh-tubuh khususnya perempuan telah menjadi objek dengan istilah tubuh yang dipatuhkan adalah tubuh yang ditundukkan, dikuasai, dikekang, yang kemudian dikontrol dengan begitu saja oleh penguasa, pemilik modal, hingga laki-laki tanpa mereka sadari. Mereka menjadi objek bagi laki-laki ataupun tidak memiliki hak atas tubuh mereka yang sewaktu-waktu tubuhnya akan dipakai tanpa izin dari berbagai tindakan seperti pandangan mata laki-laki hingga pemerkosaan. Oleh karena itu kasus pemerkosaan, penggunaan kekerasan, dan pembunuhan merupakan bentuk alienasi seksualitas yang dialami perempuan bagaimana mereka hak-hak asasi mereka sebagai perempuan telah hilang oleh

tindakan laki-laki dan bentuk kapitalisme yang mempekerjakan mereka.

B. Konsep *Policy Failure*

Berikutnya konsep *policy failure* digunakan untuk mengetahui kriteria mengenai definisi dan penyebab mengenai kebijakan yang gagal. McConell memberikan gambaran sederhana dengan mengenali dua kecenderungan yang saling berlawanan. Menurut McConell kegagalan diterjemahkan ke dalam asumsi bahwa kegagalan adalah fakta objektif. Makna kegagalan adalah ketika disandingkan dengan niat semula pemerintah, akan tetapi hal ini dapat dilihat ketika menghadirkan masalah yang tidak dapat diatasi hingga permasalahan baru yang menimbulkan resiko tinggi hingga pelanggaran hak asasi manusia.³ Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan dapat dinyatakan gagal apabila menghasilkan dampak yang tidak diinginkan atau permasalahan yang semakin memburuk.

Penyebab gagalnya suatu kebijakan tidak selalu diakibatkan oleh masalah internal, menurut analisa Bovens dan Hans dalam suatu kegagalan kebijakan tidak hanya diakibatkan oleh permasalahan teknis seperti keterbatasan sumber daya ataupun masalah kualitas individu seperti kepemimpinan yang buruk. Melainkan permasalahan sosial dan politik yang dapat diamati sebagai fakta dari suatu implementasi kebijakan. Bovens dan Hans menyebut hal ini sebagai sumber bias yang tidak disengaja dalam menilai suatu kebijakan. Sumber-sumber ini meliputi nilai, posisi, kepentingan, waktu dan budaya.⁴ Maka berdasarkan asumsi tersebut pengaruh budaya *machismo* yang mempengaruhi penggunaan kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai hal yang wajar dan hasil dari persaingan kartel narkoba yang berdampak buruk terhadap keselamatan perempuan dapat dianalisis sebagai penyebab kegagalan kebijakan *femicide*.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami data secara lebih mendalam dengan bantuan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pencegahan *Femicide* Merupakan Kebijakan yang Gagal

Menilai suatu kebijakan tentu dihadapkan dengan apakah kebijakan tersebut berjalan dengan sukses atau bahkan dapat berjalan dengan tidak sesuai tujuan yang di harapkan. Dalam menganalisa kebijakan pencegahan *femicide*, menurut hasil analisis penulis hal ini termasuk ke dalam kategori kebijakan yang gagal. Dengan Mengacu kepada kriteria kebijakan yang gagal menurut McConell, dapat diketahui beberapa alasan tertentu diantaranya:

³ Lihat A McConell, "Why Do Policies Fail: A Starting Point for Exploration," 3, <https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/McConnell%20Policy%20PSA%20April%202014.pdf>.

⁴ Lihat Mark Bovens and Paul 't Hart, "Revisiting the Study of Policy Failures," *Journal of European Public Policy* 23, no. 5 (May 27, 2016): 2–3, <https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1127273>.

Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis). (Rohiman Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti, Muhammad Iqbal)

- a. **Gagal mencapai tujuan utama** yaitu tidak berhasil dalam menurunkan dan menghilangkan segala bentuk kekerasan perempuan.
- b. **Pihak atau kelompok yang dituju memberikan dampak negatif** yaitu Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kekasih korban, masyarakat, dan kejahatan bisnis kartel narkoba. Namun ketiga pelaku tersebut tidak berhasil dicegah dan mengalami peningkatan.
- c. **Hasil dari kebijakan mengakibatkan masalah yang semakin memburuk** hal ini ditandai dengan catatan buruk pada tahun 2018 Meksiko menjadi negara dengan kasus tertinggi kedua di Amerika Latin. Sementara di tahun 2019 menjadi kasus tertinggi yang pernah terjadi di Meksiko dengan 1006 kasus.
- d. **Gagal dalam bertindak** hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan negara khususnya lembaga peradilan dalam menyelidiki kasus *femicide* dan menafsirkan mengenai alasan-alasan gender yang tertuang dalam undang-undang. Ketidakmampuan ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum dan mengakibatkan kasus *femicide* terus terulang.
- e. **Tidak ada dukungan dari pihak atau kelompok utama**, hal ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh budaya *machismo* yang telah mengakar kuat dalam jati diri laki-laki Meksiko yang telah berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang tetap merendahkan martabat perempuan. Pengaruh budaya ini mengakibatkan kebijakan menjadi bias gender. Tidak adanya kepekaan dan keseriusan pemerintah untuk menganggap bahwa Meksiko telah mengalami krisis atau darurat kekerasan gender.
- f. **Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk kebijakan tersebut.** Pada tahun 2019 pemerintah Meksiko memberikan subsidi sebesar \$ 109, 993.336,11 untuk program AVGM dan berbagai proyek yang harus dijalankan oleh pemerintah negara bagian. Akan tetapi dengan jumlah biaya tersebut tidak ada peningkatan mengenai hasil investigasi dan beberapa negara bagian seperti Campeche merupakan wilayah mendapatkan subsidi tertinggi, akan tetapi kasus *femicide* di negara bagian tersebut terus meningkat.
- g. **Tingkat inovasi yang rendah dan respon yang lambat** hal ini dikaitkan dengan sistem peradilan yang buruk disertai dengan kelalaian petugas dalam mencegah tindakan kekerasan mengakibatkan *femicide* tidak berhasil diatasi.
- h. **Norma yang kuat di masyarakat mengakibatkan kebijakan ini tidak berbanding lurus dengan nilai yang dipertahankan masyarakat.** Masyarakat Meksiko masih mempertahankan nilai-nilai *machismo* (Keunggulan laki-laki) yang mengakibatkan kesetaraan gender masih belum terwujud.

2. Penyebab Kegagalan Kebijakan Pencegahan *Femicide*

Hasil dari analisis penyebab kegagalan kebijakan pencegahan *femicide* di Meksiko, disebabkan oleh berbagai permasalahan yang di mana permasalahan sosial menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan ini. Mengacu kepada asumsi teori feminis sosialis dan asumsi Bovens dan Hans mengenai penyebab kegagalan, Maka budaya *machismo* yang tertanam kuat dalam jati diri laki-laki Meksiko yang merupakan bagian dari nilai-nilai patriarki dan bisnis kartel narkoba yang merupakan bagian dari praktek kapitalisme yang sangat kuat telah mengakibatkan kebijakan *femicide* mengalami kegagalan.

a. Kegagalan Kebijakan disebabkan oleh budaya *Machismo*

Machismo atau lebih dikenal dengan menjadi seorang pria sejati telah menempatkan sebuah rasa kehormatan dalam jati diri laki-laki Meksiko. Kehormatan ini dapat diaplikasikan ketika bagaimana seorang laki-laki berinteraksi sosial, bertahan hidup,

hingga bagaimana kepemimpinan laki-laki dalam membina suatu keluarga. Dalam kepercayaan *machismo* kehormatan ini menjadi pegangan kuat yang harus mereka pertahankan meskipun harus menggunakan bentuk kekerasan yang membahayakan mereka.

Kepercayaan budaya *machismo* dipercaya telah tertanam dalam seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini memiliki kesamaan dengan sistem patriarki yang menurut Walby (1990) merupakan sebuah sistem yang di mana tempat laki-laki mendominasi, melakukan opresi, dan melakukan eksploitasi atas perempuan.⁵ Budaya *machismo* dipercaya telah berpengaruh terhadap kegagalan kebijakan. Mengenai eksistensi pengaruh *machismo* dapat dianalisa dari berbagai permasalahan diantaranya:

Budaya *machismo* terus dipertahankan dalam metode pengasuhan dan pernikahan. Dalam masa kanak-kanak hingga remaja, laki-laki Meksiko telah dididik bagaimana mereka bertahan hidup, berkelahi untuk mengalahkan siapapun yang dipandang musuh dan ancaman bagi mereka, selain itu mereka akan mengalami bentuk kekerasan apabila dianggap telah melanggar norma-norma masyarakat. Hal ini yang kemudian telah menormalkan bentuk penggunaan kekerasan dalam keluarga.

Machismo yang terus diagungkan telah menjadi pemicu yang memandang perempuan sebagai suatu objek dari kepemilikan laki-laki yang segalanya ditentukan oleh kehendak laki-laki. Maka kasus *feminicide* memiliki makna lain bahwa laki-laki memiliki keputusan dalam menentukan riwayat kematian perempuan. Dan hal ini memiliki keterkaitan bagaimana kasus *feminicide* hingga tahun 2017 dan dipercaya sampai tahun 2019 bahwa *machismo* telah mempengaruhi bentuk penggunaan kekerasan hingga 70 persen dalam kasus *feminicide*. (El Universal, 2019). Data ini juga didukung oleh pernyataan INEGI bahwa hampir dari separuh jumlah perempuan Meksiko telah mengalami bentuk kekerasan dari pasangan dan mantan pasangan mereka.

Dengan kuatnya pengaruh *machismo* dan pengaruh nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga mengenai pernikahan telah menjadikan perempuan menjadi individu yang patuh terhadap kepala keluarga. Akibat dari hal tersebut kemudian berimbas terhadap kepatuhan perempuan telah mencegah tindakan pelaporan kekerasan, karena beberapa perempuan khususnya di wilayah Meksiko bagian barat akan bertanggung jawab atas rumah dan suami mereka yang kejam.⁶ Karena itu, bahwa beberapa dari mereka tidak memberikan informasi mengenai suami mereka dan lebih memilih untuk menjaga kehormatan dan nama baik mereka daripada mengajukan keluhan kekerasan yang mereka alami.

Berikutnya di dalam masyarakat, budaya *Machismo* telah mengakibatkan gagalnya kampanye gender. Pemerintah telah berupaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan perempuan dengan metode kampanye gender yang diatur dalam Undang-Undang *La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* pasal 38. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan, lembaga swasta dan lembaga ketenagakerjaan untuk mengkampanyekan sikap selalu menjaga dan menghormati martabat perempuan.

Namun data di lapangan bahwa lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat tetap menjadi tempat yang tidak mengedepankan kesetaraan gender.

⁵ Lihat “Dewi Candraningrum: Karier Patriarki,” *Jurnal Perempuan*, 1, accessed January 14, 2021, <http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/12/dewi-candraningrum-karier-patriarki.html>.

⁶ Lihat María Candelaria Ochoa Ávalos and Fernando Calonge Reillo, “La violencia contra las mujeres en la región occidente, México: Entre la inoperancia institucional y el conservadurismo social,” *Acta Sociológica* 65 (September 1, 2014): 141, [https://doi.org/10.1016/S0186-6028\(14\)70239-7](https://doi.org/10.1016/S0186-6028(14)70239-7).

Mengutip dari Maria dan Fernando (2014) sebagian besar program yang telah dirancang untuk menjamin integritas siswa, pada kenyataannya mereka tidak secara khusus membahas tentang tidak untuk menggunakan kekerasan antar teman sebaya. Hal ini semakin diperparah dengan pihak sekolah seringkali menunjukkan kelalaian dalam mengenali keadaan-keadaan ini dan cenderung tidak mengetahui atau lalai mengenai kekerasan yang terjadi di ruang kelas.⁷ Hal ini menandai bahwa lembaga pendidikan yang dapat berperan sebagai modal dasar dalam mengubah karakter anak secara dini tidak secara maksimal untuk mendukung program kampanye gender.

Berikutnya dalam dunia kerja, perempuan tetap menerima upah yang rendah serta ancaman akan pelecehan seksual. Di wilayah Barat, dikonfirmasi fakta umum bahwa wanita menerima upah yang jauh lebih rendah daripada yang diperoleh laki-laki dengan memperoleh upah sepertiga dari upah laki-laki. Tidak hanya upah yang rendah, tenaga kerja perempuan seringkali mendapatkan bentuk kekerasan apabila mengalami kesalahan kerja. Hal ini diperburuk dengan pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam dunia kerja. Data menunjukkan bahwa di wilayah negara bagian Barat melaporkan bahwa sepertiga perempuan mengalami beberapa jenis kekerasan di tempat kerja, dan 12 dari 100 perempuan menyatakan bahwa mereka turut mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.⁸ Keadaan ini juga diperburuk dengan suatu daerah di mana ada juga pengabaian besar oleh pihak berwenang.

Pengaruh terakhir dari budaya *machismo* adalah telah mempengaruhi kinerja pihak peradilan dan aparat kepolisian. *Machismo* dipercaya secara tidak langsung telah berpengaruh ke dalam ranah kelembagaan khususnya pihak peradilan dan aparat kepolisian. *Machismo* tampaknya telah menjadikan kasus kekerasan perempuan bukan menjadi prioritas utama pihak berwajib. Hal ini tentu berpengaruh kepada rendahnya keseriusan atau kelalaian petugas. Pernyataan ini diperkuat oleh laporan OCNF bahwa dalam banyak kasus, pihak berwenang tidak melaporkan pembunuhan perempuan, bahkan menganggapnya sebagai tindakan tidak disengaja atau bunuh diri dalam banyak kesempatan. Berdasarkan data resmi yang diberikan oleh Kantor Kejaksaan Kehakiman dan Kantor Kejaksaan Negara hanya antara 2014- 2017, sekitar 6297 wanita terbunuh di Meksiko, namun, hanya 30% dari kasus yang diselidiki di bawah Protokol Kinerja yang telah ditetapkan.

Tampaknya masing-masing kasus kekerasan atau setiap kasus *femicide* adalah folder tertutup lain yang ingin mereka arsipkan. Hal ini terbukti dari saat seorang perempuan membuat laporan tentang kekerasan karena dia telah dipukuli atau diperkosa oleh pasangannya, namun pihak bersangkutan membebaskan agresor dalam beberapa jam. Kelalaian terlihat ketika orang tua pergi untuk membuat laporan tentang anak di bawah umur yang hilang. Namun orang tua tersebut mendapatkan jawaban atau respon dari pihak berwajib yaitu: "ia pergi dengan pacarnya, mencari sebuah hotel, dan akan kembali dalam beberapa hari dan bahkan dengan membawa hadiah (hamil)". Berbagai kejadian lain yang sering terjadi saat mereka harus pergi mengambil atau menyelidiki tubuh seorang gadis atau perempuan yang telah terbunuh, mereka menolak untuk menuju dan mencari di tempat kejadian, mereka melakukan kelalaian fatal yang mengakibatkan kontaminasi atau kehilangan bukti, mereka gagal mengambil sampel, atau tidak melestarikan TKP, yang sangat penting untuk melibatkan tersangka.⁹ Hal ini merupakan bentuk impunitas yang

⁷ Lihat Ochoa Ávalos and Reillo, 135–36.

⁸ Lihat Ochoa Ávalos and Reillo, 129–34.

⁹ Lihat Liga De Mujeres Revolucion should be Liga de Mujeres Revolucionarias, "Femicide in

didefinisikan sebagai “kata sandi untuk personil dan institusi penegak hukum yang tidak kompeten, korup, dan atau terlibat di tingkat kota dan negara bagian atas tuntutan kejahatan seseorang”.¹⁰ Dalam konteks tersebut, kekerasan, korupsi dan impunitas bekerja bersamaan sebagai praktik patriarki dalam kekerasan terhadap perempuan.

b. Kegagalan Kebijakan Disebabkan oleh Bisnis Kartel Narkoba

Kapitalisme ditandai dengan sistem untuk mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini yang telah menjadi tujuan dari bisnis kartel narkoba untuk menguasai pasar dalam penyelundupan transaksi kokain dan produk ilegal dalam upaya memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok ini dikenal dengan melakukan aksi kekerasan dan tindakan kriminalitas diantaranya pemerasan, pencucian uang, perdagangan dan penyelundupan manusia hingga pembunuhan kontrak. Bahkan kelompok ini sering menyuap atau menyusup ke pasukan keamanan dan membayar atau mengancam politisi sehingga mereka menutup mata terhadap perusahaan ilegal mereka.

Bisnis yang mereka lakukan telah memperburuk kasus *femicide* yang terjadi. Dimulai dari aksi pemerkosaan yang berujung kematian, penculikan, hingga penghilangan korban. Dari aksi tersebut, Menurut Karla Quintana, Kepala Registrasi Nasional untuk Orang Hilang menyatakan pada konferensi pers bahwa: “data resmi orang hilang adalah 61.637 orang dan sekitar 26 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan”. Data ini diperoleh sejak kebijakan perang melawan kartel yaitu dari tahun 2006 di masa Presiden Felipe Calderon. Saat ini pemerintah baru menemukan 1.124 mayat di 873 lubang penguburan klandestin.¹¹

Penculikan perempuan antara lain adalah untuk mengisi kekosongan anggota dan memastikan produk mereka sampai pada tujuan. Mereka dijanjikan dengan kemewahan hidup namun apabila menolak mereka dihadapkan dengan resiko kekerasan.

Dalam menjalankan transaksinya, kelompok kartel narkoba tidak hanya bertentangan dengan pihak keamanan, akan tetapi mereka juga terlibat persaingan dengan sesama kelompok kartel untuk memperebutkan wilayah dan pasar. Persaingan tersebut beresiko kematian yang dialami perempuan. Mereka yang terbunuh merupakan pihak yang menjadi target serangan untuk melemahkan lawan atau mengirim pesan ancaman kepada anggota keluarga laki-laki. Dalam hal ini perempuan dipandang “menjadi bagian” dari musuh, dipahami sebagai objek yang dapat dimiliki, membayar dengan nyawanya karena menjadi pasangan, anak perempuan, atau kerabat dari musuh. Hal ini yang kemudian ditandai dengan kasus yang paling umum terjadi terhadap gadis-gadis berusia 18 hingga 25 tahun yang mayoritas berasal dari keluarga sederhana, seperti ibu tunggal atau tanpa suami, pekerja seks, dan para pelajar.¹²

Kuatnya pengaruh kelompok terorganisir direspon melalui kebijakan hipermiliterisasi oleh Pemerintah Federal. Mengenai keberhasilan kebijakan ini, pemerintah berhasil

Mexico: Symptom of a Sick System,” In Defence of Marxism, accessed January 14, 2021, <https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm>.

¹⁰ Lihat Heather Robin Agnew, “Reframing ‘Femicide’: Making Room for the Balloon Effect of Drug War Violence in Studying Female Homicides in Mexico and Central America,” *Territory, Politics, Governance* 3, no. 4 (October 2, 2015): 438, <https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1064826>.

¹¹ Lihat “Mexico Drug War: Almost 62,000 People Have Disappeared since 2006,” *Sky News*, accessed January 14, 2021, <https://news.sky.com/story/mexico-drug-war-almost-62-000-people-have-disappeared-since-2006-11902736>.

¹² *Revolucionarias*, “Femicide in Mexico.”

Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis). (Rohiman Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti, Muhammad Iqbal)

menangkap para pemimpin kunci, namun mereka gagal dalam memprediksi lahirnya kelompok-kelompok baru. Namun kebijakan ini memberikan dampak negatif yang hanya meninggalkan kasus tingginya kekerasan kemanusiaan khususnya pada perempuan. Selain banyak dari mereka yang tertuduh terlibat dalam kelompok tersebut dan mengalami penyiksaan, para perempuan juga mengalami tindakan pembunuhan sebagaimana anggota keluarga perempuan dari petugas polisi diketahui telah menjadi korban dengan cara yang sama begitu juga sebaliknya, hal ini menandai dengan “serangan geng terhadap polisi sering dibalaskan oleh polisi terhadap anggota keluarga perempuan anggota geng”.¹³ Maka transaksi bisnis kartel narkoba dan kebijakan hipermiliterisasi hanyalah mengakibatkan kasus *femicide* semakin memburuk.

KESIMPULAN

Gagalnya kebijakan *femicide* diakibatkan oleh budaya *machismo* dan bisnis kartel narkoba. Nilai-nilai *machismo* yang terus dipertahankan telah mengakibatkan kasus kekerasan dipandang sebagai hal yang wajar. Kondisi ini semakin diperburuk ketika kasus kekerasan perempuan terus dibiarkan dan bukan merupakan prioritas utama untuk dicegah oleh pihak berwajib. Kasus kegagalan kebijakan juga diperburuk dengan gagalannya pemerintah memperkecil aktivitas bisnis kelompok terorganisir. Kelompok tersebut melakukan segala aksi kriminal seperti penculikan dan pemerkosaan serta dampak lain dari perang melawan pesaing yang menjadikan perempuan sebagai objek untuk dibunuh dengan tujuan melemahkan kekuatan dan memberikan ancaman bagi pesaing.

Bibliography

- Agnew, Heather Robin. “Reframing ‘Femicide’: Making Room for the Balloon Effect of Drug War Violence in Studying Female Homicides in Mexico and Central America.” *Territory, Politics, Governance* 3, no. 4 (October 2, 2015): 428–45. <https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1064826>.
- Bovens, Mark, and Paul ‘t Hart. “Revisiting the Study of Policy Failures.” *Journal of European Public Policy* 23, no. 5 (May 27, 2016): 653–66. <https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1127273>.
- “Dewi Candraningrum: Karier Patriarki.” *Jurnal Perempuan*. Accessed January 14, 2021. <http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/12/dewi-candraningrum-karier-patriarki.html>.
- Joseph, Janice. “Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses.” *Temida* 20, no. 1 (2017): 3–21.
- McConnell, A. “Why Do Policies Fail: A Starting Point for Exploration.” Presented at the Paper presented at Political Studies Association (PSA), 2014. <https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/McConnell%20Policy%20PSA%20April%202014.pdf>.
- “Mexico Drug War: Almost 62,000 People Have Disappeared since 2006.” *Sky News*. Accessed January 14, 2021. <https://news.sky.com/story/mexico-drug-war-almost-62-000-people-have-disappeared-since-2006-11902736>.
- Ochoa Ávalos, María Candelaria, and Fernando Calonge Reillo. “La violencia contra las mujeres en la región occidente, México: Entre la inoperancia institucional y el

¹³ Agnew, “Reframing ‘Femicide,’” 441.

conservadurismo social.” *Acta Sociológica* 65 (September 1, 2014): 135.
[https://doi.org/10.1016/S0186-6028\(14\)70239-7](https://doi.org/10.1016/S0186-6028(14)70239-7).

Revolucionarias, Liga De Mujeres Revolucion should be Liga de Mujeres. “Femicide in Mexico: Symptom of a Sick System.” In *Defence of Marxism*. Accessed January 14, 2021. <https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm>.

Toledo Vásquez, Patsilí, Naciones Unidas, Derechos Humanos, and Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. *Feminicidio: Consultoría para la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*. México: Naciones Unidas : Derechos Humanos : OACNUDH, 2009.